

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro merupakan bagian yang penting dari perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia memberikan kemudahan dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia, karena pada umumnya usaha mikro tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kontribusi usaha mikro dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Pemerintah terus berupaya agar usaha mikro di Indonesia semakin berkembang seperti pembinaan usaha, pelatihan ketrampilan dan fasilitas kemudahan dalam permodalan usaha kepada pelaku usaha mikro.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Usaha mikro mempunyai peran yang sangat strategis bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro telah membuktikan diri mampu

memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia dan sekaligus membuktikan bahwa Usaha mikro mampu bertahan dalam krisis global. Usaha mikro mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kebijakan usaha mikro di Kota Semarang memiliki hierarki regulasi dalam pembuatan program. Pada tingkatan teratas berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Dalam hal ini, peraturan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh daerah di Indonesia dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Pada prosesnya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota seringkali kurang fokus dalam melakukan pemberdayaan kepada para UMKM hingga menyebabkan tumpang tindih dalam pemberdayaan, oleh karena permasalahan yang mendasar tersebut hingga akhirnya terdapat Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2016, maka pemberdayaan UMKM terpisah menjadi dua bagian, dimana usaha mikro menjadi tanggungjawab pemerintah kota, ada juga usaha kecil dan menengah menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

Sebagaimana hierarkis regulasi yang mengatur tentang UMKM. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13

Tahun 2013 menjadi dasar kebijakan dalam menentukan arah pembangunan usaha mikro di Kota Semarang.

Kebijakan usaha Mikro merupakan langkah yang sesuai dengan Visi Kota Semarang untuk menjadikan Kota Perdagangan Dan Jasa. Visi tersebut memiliki arti bahwa kegiatan usaha mikro mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi suatu daerah. Selain itu, usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Pemberdayaan Usaha Mikro telah memiliki masing-masing program sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM pasal 7 ayat (3) dimana terdapat ruang lingkup pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui upaya (a) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (b) Pembiayaan Dan Penjaminan; (c) Produksi Dan Produktivitas; (d) Kemitraan Dan Jejaring Usaha; (e) Fasilitasi Perizinan Dan Standarisasi; dan (f) Pemasaran.

Terdapat beberapa alasan mengapa keberadaan usaha mikro sangat penting. Pertama, Usaha mikro berperan dalam memberikan pelayanan

ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. Kedua, saat terjadi krisis moneter 1998 dan krisis 2008-2009 sebesar 96% pelaku usaha mikro tetap bertahan dari guncangan krisis. Usaha mikro juga sangat membantu negara pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat usaha mikro juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Ketiga, usaha mikro memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga usaha mikro perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat agar terjadi alur bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar (Bank Indonesia, 2015).

Indonesia sendiri untuk mengukur banyaknya jumlah penduduk miskin menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran ini dilakukan dengan melihat besar rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. 2.100 kalori per hari digunakan untuk patokan kebutuhan minimum makanan sedangkan untuk kebutuhan non-makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat

penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud dengan sumber daya manusia yang baik, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2001).

Selain itu kemiskinan juga dihubungkan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Maka dari itu persoalan kemiskinan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Penyebab kemiskinan yang terdapat pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) Nurkse 1953 (dalam Kuncoro, 1997:132), adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (berdampak pada tingginya pengangguran). Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan (tercermin oleh rendahnya upah) yang akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Dalam perkembangannya, usaha mikro menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal pengolahan data produkproduk

unggulan yang dimiliki oleh usaha mikro dalam suatu daerah. Karena dengan terbatasnya akses informasi data usaha mikro mengakibatkan rendahnya informasi data yang dibutuhkan mengenai usaha mikro. Miskinnya informasi mengenai data usaha mikro tersebut, menjadikan usaha mikro tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus. Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing usaha mikro. Agar dapat menguasai pasar, maka usaha mikro di wilayah kota Semarang perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh usaha mikro.

Informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan misalnya jenis barang atau produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen di daerah tertentu, bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, berapa harga pasar yang berlaku. Dengan demikian, usaha mikro di wilayah kota Semarang dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dalam menjalankan usahanya akan lebih inovatif. Informasi pasar yang lengkap dan akurat dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro untuk membuat perencanaan usahanya secara tepat, misalnya: membuat desain produk yang disukai konsumen, menentukan harga yang bersaing di pasar, mengetahui pasar yang akan dituju, dan banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu peran pemerintah

sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan usaha mikro dalam memperoleh akses informasi untuk memperluas jaringannya.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh usaha mikro di Kota Semarang tersebut menjadikan Usaha mikro semakin eksis dan akan selalu eksis dari masa ke masa. Walaupun keberadaannya di Indonesia sangat penting, usaha mikro masih memiliki keterbatasan untuk berkembang, hal ini mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam menjaga keberlangsungan kegiatan sektor usaha mikro. Berbagai kebijakan dibuat agar mempermudah pengusaha kecil untuk semakin mengembangkan usahanya. Berikut tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah Usaha mikro di Kota Semarang pada tiap kecamatan di tahun 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kota Semarang di Tiap Kecamatan
Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Genuk	772	857
2	Semarang Timur	952	1.017
3	Semarang Tengah	1.163	1.213
4	Semarang Barat	1.081	1.252
5	Tugu	381	398
6	Gayamsari	964	1.023
7	Semarang Utara	1423	1.550
8	Ngaliyan	481	569
9	Pedurungan	2.503	2.646
10	Mijen	434	458
11	Gunung Pati	476	520
12	Gajah Mungkur	524	581

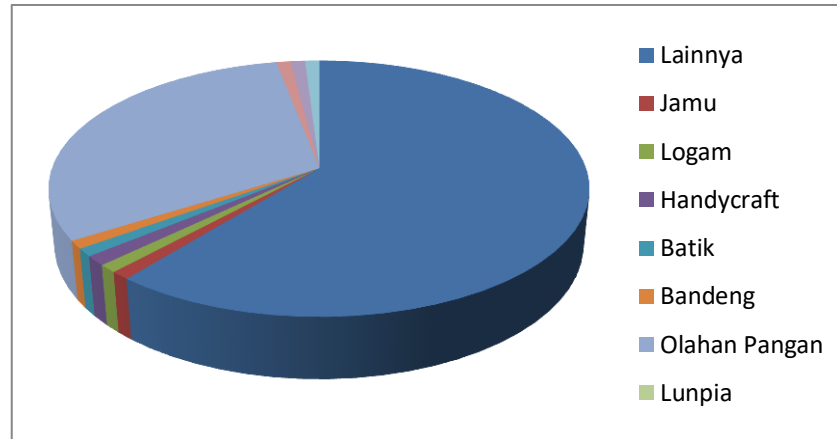
13	Semarang Selatan	851	965
14	Candisari	601	636
15	Banyumanik	799	858
16	Tembalang	1.391	1.597
Jumlah		14.796	16.164

Sumber : *dinkopdanusahamikro.semarangkota.go.id*

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa secara kuantitas pelaku usaha mikro di Kota Semarang sudah cukup banyak, akan tetapi yang perlu diperhatikan tentang pemerataan dalam pengembangan usaha mikro di tiap Kecamatan Kota Semarang. Dalam tabel 1.1 dapat dilihat bahwa di tiga Kecamatan yang banyak menghasilkan para pelaku usaha mikro, seperti Pedurungan mencapai 2.646 usaha mikro, diikuti dengan Tembalang 1.597, dan Semarang Utara 1.550. Jumlah usaha mikro di tiap daerah yang kurang merata, perlu adanya evaluasi, inovasi dan pengawasan terhadap pembinaan yang ada di tiap kecamatan agar pemerataan tersebut terjadi di tiap Kecamatan Kota Semarang.

Pengembangan Produk usaha mikro haruslah sesuai dengan kriteria yang diperlukan pada tiap daerah, hal ini agar dimungkinkan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk atau pelayanan yang ditawarkan. Berikut gambar 1.1 yang menunjukkan clustersasi usaha mikro di Kota Semarang.

Gambar 1.1
Clusterisasi Usaha Mikro Kota Semarang



Sumber : dinkopdanusahamikro.semarangkota.go.id

Pada gambar 1.1 telah memberi penjelasan, bahwa usaha mikro yang menjadi keunggulan yaitu di bidang lainnya (Seperti usaha Kos-kosan, PKL, dan lain-lain) dan bidang olahan pangan. Hal ini sangat dimungkinkan adanya evaluasi, mengingat adanya perdagangan yang belum mapan dalam memasarkan produk.

Pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting dalam suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, hingga datangnya krisis nilai tukar tereskalasi menjadi krisis multi dimensi yang dimulai akhir tahun 1997.

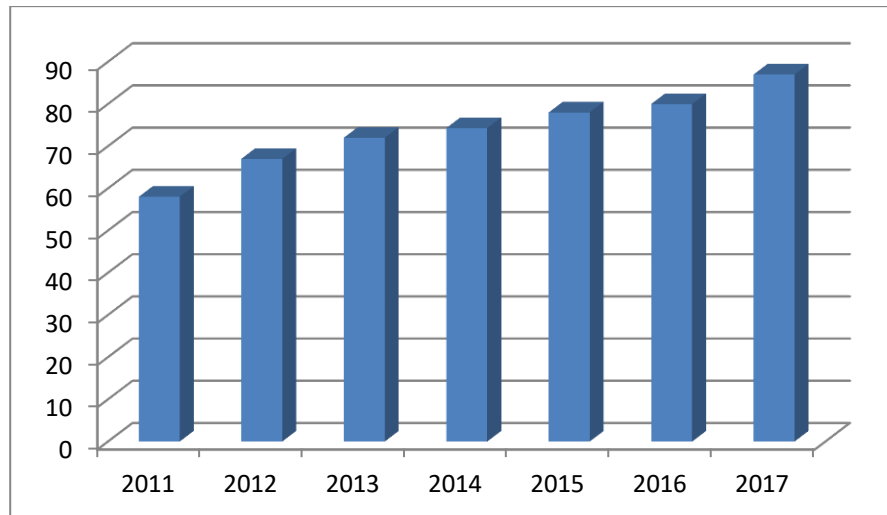
Adanya semangat kewirausahaan ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terutama pada kondisi saat ini dimana globalisasi sudah menjadi hal yang jamak. Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut, diperlukan kemampuan untuk terbuka terhadap ide-ide baru, berani menghadapi risiko dan tidak mudah menyerah. Ketiga sifat tersebut, umumnya

ditemukan pada individu yang memiliki semangat kewirausahaan (Wennekers & Thurik, 1999).

Pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan pada skala global maupun lokal. Dalam skala global, isu pembangunan manusia merupakan isu yang menjadi perhatian dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tiga di antara 17 tujuan yang ingin dicapai dalam TPB terkait dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ke tiga, ke empat dan ke delapan. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia merupakan tujuan ke tiga TPB. Tujuan ke empat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan ke delapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (BPS, 2014).

Prioritas Nasional (Nawacita) tahun 2015-2019 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Agenda ke lima dari Nawacita menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Implementasi yang dilakukan dengan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yaitu dengan program Indonesia Pintar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera (Bappenas, 2014).

Gambar 1.2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang
Tahun 2011-2017 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Desember 2017

Kemajuan usaha mikro di Kota Semarang juga dapat dilihat dari gambar 1.2 Dimana nilainya terus meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2017 yang menunjukkan bahwasanya perkembangan perekonomian di Kota Semarang semakin baik yang mana dapat dilihat dari angka PDRB yang terus naik/meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut juga tentunya tidak lepas dari pertumbuhan usaha mikro yang ada di Kota Semarang.

Meskipun usaha mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan usaha mikro telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang

pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan usaha mikro. Sehubungan dengan hal tersebut usaha mikro perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro dan pengembangan dan pembinaan usaha mikro. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di definisikan masalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya jumlah usaha mikro di Kota Semarang.
2. Rendahnya komitmen masyarakat Kota Semarang terhadap pemberdayaan usaha mikro
3. Rendahnya kerjasama yang dibangun oleh *stakeholder*.
4. Lemahnya Pengawasan oleh *stakeholder*.
5. Rendahnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemberdayaan usaha mikro.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan usaha mikro Di Kota Semarang ?

2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan usaha mikro Di Kota Semarang ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan usaha mikro Di Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan usaha mikro Di Kota Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Semarang. Serta mengembangkan teori-teori pada ilmu sosial dan politik secara umum serta berguna bagi pengembangan dan penalaran organisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Adanya penelitian ini, penulis dapat menerapkan disiplin ilmu yang didapat selama ini di bangku kuliah dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya dalam pengembangan usaha mikro di Kota Semarang.

- b. Universitas

Menambah literatur dan informasi sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang selanjutnya berkaitan dengan pengembangan usaha mikro di Kota Semarang.

- c. Pemerintah Kota Semarang

Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan usaha mikro di Kota Semarang.

d. Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis yang lebih mendalam mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Semarang.

1.6 Penelitian Terdahulu

Pembahasan dan kajian terkait dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah pada skripsi ini, sebelumnya penulis telah melakukan observasi terhadap penelitian yang telah dilakukan dengan pembahasan yang hampir sama yaitu tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah namun berbeda lokus penelitian dan teori yang digunakan. Berikut ini terdapat beberapa penelitian terkait dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

PENELITI	TAHUN	TUJUAN	METODE	TEMUAN
Ahmad Anshorimus lim Syuhada Dan Windy Gambetta.	2013	Memberikan pengetahuan bahwasanya usaha mikro di Indonesia menjadi kurang	Metode Kualitatif	Perekonomian Indonesia saat ini didukung oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdiri sekitar 52 juta

		<p>berkembang karena kurangnya keterampilan dan publikasi harus diperbaiki, karena mengingat peran usaha mikro di Indonesia yang besar dalam menyumbang pendapatan negara.</p>		<p>unit pada tahun 2011, sebesar 60% kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB). Pada usaha mikro di Indonesia mempunyai beberapa kekurangan, dimana para pedagang atau pelaku usaha mikro kurang memiliki keterampilan pemasaran yang menghambat pada pertumbuhan dan perkembangannya, terlebih usaha mikro di Indonesia Produk-produk usaha mikro yang beredar di pasar tidak dilengkapi dengan publikasi</p>
<p>Mircea Liviu Negrut, Ana-Andreea Mihartescu.</p>	2013	<p>Menjadikan kemajuan pada pelaku Usaha kecil dan menengah dalam pemasaran terhadap produk.</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Usaha Kecil dan Menengah adalah dasar dari pembangunan ekonomi dan sosial di banyak negara. Sayangnya kontribusi untuk pengembangan Rumania, usaha kecil dan menengah cukup rendah. Ini sebagian besar karena alasan berikut: Ekonomi pasar masih muda, hanya 25 tahun, Kurangnya budaya manajerial banyak pengusaha, Akses sulit ke sumber daya keuangan (khususnya dana hibah), Undang-undang</p>

				berfluktuasi dan terkadang sulit untuk diterapkan.
Mohd. Ghazali dan Fatimah Mahmud	2013	Menunjukkan bahwa dalam proses kinerja, tenaga pendidik harus memiliki kemampuan yang berbagai macam untuk memberikan suatu bentuk pembelajaran yang berkualitas baik.	Metode Kuantitatif	Berdasarkan sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Departemen statistik Malaysia, terdapat 645.136 UKM yang idirikan dari total 662.939 pendirian di Malaysia (Departemen Statistik Malaysia, 2011). Persahaan-perusahaan UKM ini terlibat dalam berbagai sektor ekonomiseperti manufaktur, jasa, ertanian, pertambangan dan enggalian, dan onstruksi.
Ariani Dan Mohamad Nur Utomo.	2017	Kontribusi dan peran usaha mikro pada perekonomian nasional sangat berarti, namun dari sisi daya saing banyak kelemahan dan permasalahan bagi usaha mikro yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan baik di dalam negeri maupun secara global. Peluang pengembangan	Metode Kualitatif	strategi pengembangan usaha bagi usaha mikro perlu dirumuskan dan dapat menjadi rekomendasibagi pemerintah dan stakeholder lainnya dalam membuat kebijakan pemberdayaan usaha mikro di kota Tarakan

		usaha mikro di kota Tarakan provinsi Kalimantan Utara tentunya menjadi strategis.		
Yuli Rahmini Suci.	2017	Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro perlu dilanjutkan dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.	Metode Kuantitatif	bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia telah banyak memberikan berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 55.56% berdasarkan data Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pada tahun 2008

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dihimpun dari beberapa jurnal dapat disimpulkan, bahwasanya suatu Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu tonggak kebangkitan perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus atau masalah yang pernah terjadi di Indonesia setelah selamat dari adanya krisis moneter pada tahun 1998. Dimana banyak perusahaan besar yang gulung tikar, akan tetapi dari usaha mikro sendiri justru lebih baik, hal tersebut karena usaha mikro tidak terlalu bergantung pada hutang luar negeri.

Pada kenyatanya pula, berbagai macam pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang diberikan dari pemerintah harus maksimal dan merata. Kepedulian pemerintah terhadap usaha mikro tentunya akan membangkitkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengentaskan kemiskinan.

1.7 Kajian Teori

1.7.1 Administrasi Publik

1.7.1.1 Pengertian Administrasi Publik

Sebagai disiplin ilmu Administrasi Publik bertujuan memecahkan masalah yang ada di publik melalui peningkatan dalam berbagai bidang diantaranya bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu di mana keputusan-keputusan tersebut seyogianya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk *mencapainya (Public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve).*

Definisi di atas dapat dimaknai bahwa kebijakan publik itu berisi sejumlah keputusan yang terangkai (tidak tunggal tetapi banyak keputusan dan tidak terpisah), tujuannya jelas termasuk cara untuk mencapai tujuan tersebut, dibuat untuk merespons masalah yang terjadi pada suatu situasi tertentu oleh seorang aktor atau sejumlah aktor politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk pula aktor nonpemerintah). Berdasarkan definisi ini, bila dilihat dari aspek aktor yang terlibat, yaitu seorang aktor atau sejumlah aktor, mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson.

Kelebihan Jenkins adalah menambahkan dengan kata 'politik' setelah kata aktor sehingga menjadi aktor politik. Ini mempunyai arti bahwa dalam proses kebijakan publik yang terlibat adalah aktor pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan juga aktor nonpemerintah (swasta, LSM, media, dan lain-lain). Selain itu, juga ditegaskan oleh Jenkins bahwa perumusan kebijakan itu dalam rangka merespons masalah sosial yang terjadi pada situasi tertentu. Tentunya tidak sembarang.

1.7.1.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma – paradigma Ilmu Administrasi Negara menurut (Basheka, 2012; Henry, 2007; International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968; Peters, 2003) adalah sebagai berikut:

a. Paradigma 1 : Dikotomi Administrasi Politik (1900-1926)

Asumsi utama dari paradigma dikotomi administrasi politik adalah gagasan pemisahan fungsi politik dan administrasi pemerintahan sebagai strategi untuk mempromosikan efisiensi dan efektifitas. Ini adalah era model administrasi generik yang mempromosikan bahwa administrasi atau manajemen harus memiliki prinsip-prinsip ilmiah yang dapat bekerja baik dalam pengaturan publik atau pribadi. Basheka (2012) menyatakan bahwa Woodrow Wilson yang memelopori paradigma ini dengan artikelnya pada tahun 1897 menetapkan empat persyaratan administrasi publik yang efektif, yaitu, (1) Pemisahan politik dan administrasi, (2) Analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta, (3) Meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap seperti bisnis terhadap operasi sehari-hari, dan

(4) Meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri sipil, serta mendorong penilaian berbasis prestasi, (Basheka, 2012). Patut dihargai bahwa paradigma ini memulai bidang penelitian dengan memberikan landasan yang kuat untuk berteori dan pedagogi administrasi publik. Lebih penting lagi, ia memberi bidangnya orientasi ilmiah dengan berusaha membedakan fakta dari nilai-nilai. (Henry, 1975 : 379)

b. Paradigma 2 : Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip paradigma administrasi merupakan kemajuan untuk orientasi manajemen melalui peningkatan administrasi publik, bahkan administrasi / manajemen ke status ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ada kepercayaan bahwa ada prinsip-prinsip administrasi ilmiah tertentu yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, dan prinsip-prinsip ini dengan karakteristik ilmiah mereka, dapat bekerja di lingkungan administrasi tanpa memperhatikan. sektor, budaya, fungsi, lingkungan, misi atau kerangka kerja kelembagaan. Gulick dan Urwick (1937) mengidentifikasi tujuh prinsip administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran (POSDCORB) adalah puncak dari tahap ini (Basheka, 2012).

Walsh dan Stewart (1992) sebagaimana diwakili oleh Peters (2003, hlm. 8-9) secara lebih rinci memberikan fitur atau asumsi dari model tradisional yang terdiri dari:

- 1) Asumsi swasembada: pemerintah adalah aktor mandiri yang dapat bertindak mandiri pada ekonomi dan masyarakat.
- 2) Asumsi kontrol langsung: pemerintah terstruktur secara internal oleh otoritas dan hierarki, sehingga individu-individu di puncak organisasi piramida dianggap mampu melakukan kontrol dalam organisasi mereka sendiri.
- 3) Asumsi akuntabilitas ke atas: Akuntabilitas meningkat ke atas, dengan pejabat karier menjawab "penguasa" politik mereka dan menteri yang menjawab legislatif. Cara pertanggungjawaban ini menjadi bentuk utama dari hubungan administrasi dengan sistem politik, dan dengan sistem sosial di sekitarnya.
- 4) Asumsi keseragaman: Pemerintah seharusnya memperlakukan semua warga negara secara setara dan memberikan manfaat dan kekurangan yang sama. Untuk semua orang yang berada di tempat yang sama. Ini tampak sebagai konsepsi dasar keadilan.
- 5) Asumsi sistem kepegawaian negeri: Yaitu, prosedur pendirian standar, di mana personel di sektor publik akan diatur melalui layanan sipil formal untuk perekrutan, membayar, penilaian, dan aspek-aspek lain dari manajemen internal. Asumsi-asumsi ini dan dampaknya terhadap administrasi publik telah ditantang oleh paradigma lain yang dimulai dengan dua tahap berikutnya.

c. Paradigma 3 : Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970) melihat pemberontakan para ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik. Pada periode yang sama, ada peningkatan upaya untuk teori manajemen untuk juga mengklaim disiplin. Basheka (2012) menggambarkan periode sebagai era defleksi dikotomi dan menelusuri prinsip-prinsip. Dengan demikian, dikotomi politik-administrasi dibantah dengan alasan tidak terpisahkannya administrasi dari politik di dunia pemerintahan yang sesungguhnya. Politik menurut Basheka yang awalnya berarti politik partisan dan korup meluas dalam arti ilmiah pada 1930-an untuk memasukkan pembuatan kebijakan publik. Pada titik ini, menjadi jelas bahwa dikotomi secara praktis tidak dapat dipertahankan.

Bagi para sarjana seperti Gaus (1950), teori administrasi publik pada zaman kita juga berarti teori politik. Ia juga berpendapat bahwa tidak ada yang namanya "prinsip administrasi". Perilaku Administratif Herbert A. Simon: Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administratif (1947) mungkin merupakan sumber tantangan paling penting pada periode ini.

Pendekatan ini terus memperkuat pendekatan birokrasi, tetapi tentu saja menyebabkan birokratisasi yang berlebihan dan pembagian administrasi publik ke hampir setiap aspek pemerintahan mulai dari penentuan kebijakan hingga implementasinya, layanan dan ekonomi. Farazmand (2002) menyatakan bahwa administrasi publik selama periode

ini “menekankan pembangunan institusi, birokratisasi, nasionalisasi, dan berbagai macam peningkatan kapasitas organisasi dan administrasi untuk pembangunan nasional dan ekonomi.” Produk akhirnya adalah penobatan negara kesejahteraan.

d. Paradigma 4 : Administrasi Negara Sebagai Manajemen (1956-1970).

Paradigma keempat menurut Henry (1975) merujuk pada administrasi publik sebagai manajemen. Ini sebenarnya bertepatan dengan ke-3 yang menunjukkan bahwa itu bukan kemenangan win-win untuk ilmu politik karena beberapa sarjana mengkonsolidasikan pandangan manajemen administrasi publik. Jelas, pada tahap 3 dan 4, kedua disiplin ilmu yang memperjuangkan jiwa administrasi publik hampir tidak meninggalkan lokus dan fokus untuk sains yang baru diakui dan bidang studi yang diselidiki oleh para sarjana perintis. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Henry (1975), disiplin adalah untuk bertahan dari serangan ini karena paradigma selanjutnya digambarkan sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, atau Administrasi Publik sebagai Manajemen Publik (dari 1970 hingga 1990).

e. Paradigma 5 : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Administrasi negara telah tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik. Setiap unsur aparatur negara termasuk birokrasi di dalamnya apapun posisinya dari staf hingga jabatan tertinggi, memiliki peran dalam

proses kebijakan publik sesuai batas kewenangannya masing-masing. Peran dan tanggung jawab aparatur negara dalam proses kebijakan publik menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya posisi dan jenjang jabatan pemerintahan yang diembannya.

e. Paradigma *Governance* (1990-sekarang)

Pergeseran paradigma ini berkembang untuk tata kelola pemerintahan, sedangkan tujuan pemerintah dan administrasi publiknya adalah tata kelola. Ini adalah istilah yang biasanya digunakan sebagai sinonim dengan kata pemerintah atau untuk memenuhi syarat kegiatannya. Konsep ini tidak baru tetapi telah memperoleh makna dan aplikasi baru dari akhir 1980-an dan 1990-an. Ini dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang oleh para pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara atau rakyatnya, proses rumit di mana beberapa sektor masyarakat menggunakan kekuasaan, dan memberlakukan dan mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi manusia. Orientasi tersebut membawa kepada dimensi partisipasi dan interaksi kelembagaan, dan pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014).

1.7.2 Kebijakan Publik

Thomas R.Dye dalam Suwitri (2009:9) mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Usaha mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan atau

tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

George C. Edwards III dan Ira Sharskansky dalam Suwitri (2009:9) juga sependapat dengan pandangan Thomas, R. Dye mengemukakan kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Riant (2012: 707-710) mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

a. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

b. Tepat Pelaksananya

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

c. Tepat Target

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

d. Tepat Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

e. Tepat Proses

Terdiri atas tiga proses. Yaitu Policy Acceptance, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy adoption, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Strategic Readiness, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

1.7.3 Implementasi Kebijakan

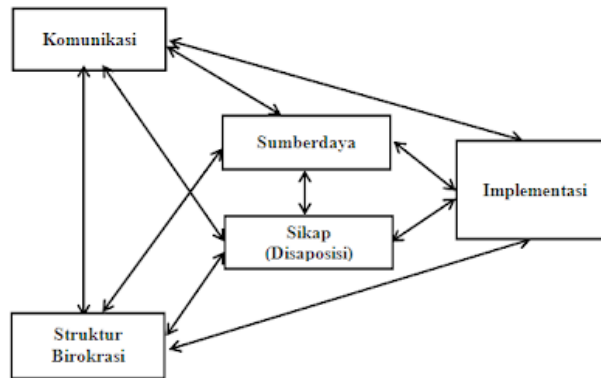
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan yang sederhana, namun kompleksitas implementasi ditunjukkan mulai dari banyaknya aktor yang terlibat, organisasi serta proses implementasinya yang dipengaruhi oleh banyak variabel. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gambar 1.3

Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III



Sumber : Edward III (Dalam Subarsono, 2005:91).

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:90), keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Dimana yang menjadi tujuan agar dapat di transmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:91), mengemukakan bahwa sumberdaya merupakan faktor penting dalam menjalankan implementasi yang sudah di rencanakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yaitu kompetensi imlementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor pentig untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:91), mengemukakan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:92), mengemukakan bahwa struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur birokrasi adalah dengan adanya SOP (*Standart Operasional Procedure*) dimana memiliki aturan atau pedoman pokok dalam melakukan bertindak. Birokrasi yang panjang tentu akan melemahkan suatu proses kebijakan yang akan dilakukan serta cenderung melemahkan pengawasan.

1.7.4 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

1.8 Fenomena Penelitian

(Implementasi Kebijakan Usaha Mikro Di Kota Semarang)

Fenomena penelitian berisi tentang aspek-aspek yang terkait dengan persoalan apa saja yang akan diteliti oleh peneliti dalam menggambarkan fakta yang sebenarnya dengan masalah yang akan diteliti. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian (*research design*) tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah yang harus ditempuh. Fenomena penelitian yang akan diamati dalam penelitian ini adalah mengenai

Implementasi Kebijakan Usaha Mikro Di Kota Semarang. Fenomena implementasi kebijakan usaha mikro akan dilakukan dengan memahami proses implementasi. Peneliti akan mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi berjalannya implementasi yang kemudian dapat menjelaskan kegagalan atau keberhasilan implementasi tersebut. Fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan Usaha Mikro Di Kota Semarang.

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dapat dinilai dengan seberapa jauh kebijakan usaha mikro dapat memecahkan masalah tentang kemiskinan ataupun pengangguran dan kejelasan isi kebijakan usaha mikro oleh masyarakat. Hal ini dapat dinilai dari :

- 1) Intensitas Tujuan
- 2) Kejelasan Isi

b. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana dinilai dari peran ketiga pilar *good governance* yaitu :

- 1) Peran pemerintah dalam kebijakan usaha mikro di Kota Semarang.
- 2) Peran Swasta dalam berkontribusi terhadap kebijakan usaha mikro di Kota Semarang.
- 3) Peran Masyarakat dalam mendukung kebijakan usaha mikro di Kota Semarang.

c. Ketepatan Target

Ketepatan Target dapat dinilai dari respon masyarakat terhadap kebijakan usaha mikro di Kota Semarang.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dapat dinilai dari lingkungan internal dan eksternal.

- 1) Lingkungan internal dapat dilihat dari interaksi lembaga pembuat dengan lembaga pelaksana kebijakan usaha mikro.
 - 2) Lingkungan eksternal dapat dilihat dari interaksi lembaga pelaksana dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan usaha mikro.
- e. Ketepatan Proses
- Ketepatan proses dapat dilihat dari :
- 1) Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan usaha mikro .
 - 2) Kesiapan masyarakat sebagai bagian dari pelaksana kebijakan usaha mikro.
2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi Kebijakan Usaha Mikro Di Kota Semarang.
- a. Komunikasi
- 1) Metode yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengkomunikasikan kebijakan Pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang
 - 2) Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat terkait kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang.
 - 3) Konsistensi Pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang.
- b. Sumberdaya
- 1) Sumberdaya manusia yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang.
 - 2) Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang.

c. Disposisi

Disposisi dapat dinilai dari sikap demokratis Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan fungsi pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dinilai dari SOP pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi dasar, pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian (*research design*) tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah yang harus ditempuh. Metode penelitian yang dilakukan penulis meliputi :

1.9.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2007: 6). Penelitian ini secara spesifik lebih diarahkan pada desain penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk menuturkan pemecahan

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah pada pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lingkup tempat atau wilayah pelaksanaan penelitian di Kota Semarang. Di dalam melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah pada pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

1.9.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang memberikan informasi dalam suatu wawancara penelitian dinamakan responden atau informan. Informan adalah orang yang dipilih agar dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang dimaksud subyek penelitian menurut Kamus Bahasa Indonesia (1989: 862). Adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran.

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian (dalam Moloeng,2011 : 132) usaha untuk mencari informasi dilakukan dengan cara:

1. Melalui Keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain).
2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling berupa *snowball sampling*. Teknik ini merupakan pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan atau yang memuaskan, maka mencari informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Terdapat beberapa subyek peneliti yang dapat di dapat dalam penelitian, yaitu Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Para pelaku usaha mikro di Kota Semarang dan Masyarakat Kota Semarang.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Seperti diterangkan Nasution (1992) dalam Prastowo (2011:43), penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistik meskipun tidak menolak data kuantitatif.

1.9.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2011: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selbihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian secara langsung. Data tersebut berasal dari daftar pertanyaan penelitian untuk informan atau aktor yang berkaitan mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah pada pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti agar data tersebut saling melengkapi.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010: 62). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh data atau keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan dengan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Alat pengumpulan data disebut pedoman wawancara dan sumber datanya disebut informan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini yang bertunjuk sebagai informan adalah Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelaku usaha mikro dan masyarakat di Kota Semarang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku panduan, majalah-majalah, dan transkrip yang berhubungan mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pertumbuhan unit usaha mikro di Kota Semarang, dan berbagai upaya serta program yang akan ataupun telah dilaksanakan.

1.9.7 Analisis Dan Interpretasi Data

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah pada pelaku usaha mikro di Kota Semarang melihat bagaimana pentingnya usaha mikro dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro yang ada di Kota Semarang. Oleh karena itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni mengumpulkan data dengan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif.

Data yang di peroleh akan dianalisis berupa keterangan-keterangan maupun fenomena hasil observasi yang ada di lapangan dan data yang di dapatkan melalui wawancara dengan informan, setelah itu data dianalisis menggunakan kalimat yang logis dan sistematis. Sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman, teknik analisis interaktif terdiri dari empat hal utama yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dialami, juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan

bahan rencana pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan pengamatan secara langsung keadaan, kondisi, dan situasi yang berkaitan dalam daya dukung peningkatan usaha mikro baik sarana prasarana, sumber dana, produktivitas, pemasaran dan lain sebagainya.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang kemudian diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan, menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks ke dalam bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Tahap penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu penggambaran makna yang utuh dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang ditarik kemudian diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

1.9.8 Kualitas Data Dan Keabsahan Data

Dalam menganalisis data, penulis juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid dan berkualitas. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penulisan ini digunakan teknik triangulasi. Kemudian dalam penelitian ini digunakan lima teknik pengecekan dari sembilan teknik yang dikemukakan oleh Moleong (2002:175-191) menungkapkan ada lima. Kelima teknik tersebut adalah:

- 1.) Observasi yang dilakukan secara terus menerus (*persistent observation*) yaitu langkah ini dilakukan dengan mengadakan observasi secara terus menerus terhadap subyek yang diteliti, guna memahami gejala lebih mendalam, sehingga dapat mengetahui aspek-aspek yang penting sesuai dengan fokus penelitian.
- 2.) Trianggulasi (*triangulation*) sumber data, metode, dan penelitian lain. Yang dijelaskan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu sendiri untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.

- 3.) Pengecekan anggota (*member check*) yaitu langkah yang dilakukan dengan melibatkan informan untuk mereview data, untuk mengkonfirmasi antara data hasil interpretasi peneliti dengan pandangan subyek yang diteliti. Dalam member check ini tidak diberlakukan kepada semua informan, melainkan hanya kepada mereka yang dianggap mewakili.
- 4.) Diskusi teman sejawat (*reviewing*) yaitu mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti pada dosen pembimbing, pakar penelitian atau pihak yang dianggap kompeten dalam konteks penelitian, termasuk juga teman sejawat.
- 5.) Pengecekan mengenai ketercukupan referensi (*referential adequacy check*) Untuk memudahkan upaya pemeriksaan kesesuaian antara kesimpulan penelitian dengan data yang diperoleh dari berbagai alat, dilakukan pencatatan dan penyimpanan data dan informasi terhimpun, serta dilakukan pencatatan dan penyimpanan terhadap metode yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data selama penelitian.

William wiersma (Sugiyono, 2016: 372), mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber merupakan, uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik merupakan, uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa menggunakan wawancara, yang dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi
- c. Triangulasi waktu, merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Penelitian ini pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan mewawancarai satu informan saja, melainkan melakukan wawancara lagi dengan informan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai fakta dilapangan. Kemudian memastikan kebenaran atau validitas data dengan menganalisis data hasil wawancara dengan kondisi dilapangan dengan cara observasi dan dokumentasi.